

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mukthie Fadjar. 2013. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang Informasi dan transaksi elektronik. (legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Sobirin. 2007. *Budaya Organisasi: Pengertian, makna dan aplikasinya dalam kehidupan organisasi*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Afif, Zaid, Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol.2 No.5, Juli-Desember 2018.
- Antonius Ansokhi. 2003. Antonia Panca, dan Yohanes Babari, *Relasi dengan Sesama*, Jakarta: Gramedia..
- Azhar Kasim. 1995. *Teori Pembuatan Keputusan*. Jakarta: lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Bagir Manan. 2001. *Menyongong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Bandung: Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Basri, Hasan “Analisis Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Merit Sistem (Studi Penelitian Di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah)”. (Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017).
- Budi Agus Riswandi. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Civil Apparatus Policy Brief, “Dikotomi Sistem Merit Dan Politisasi Birokrasi Dalam Pengangkatan Jabatan Asn”, (Jurnal Badan Kepegawaian Negara, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian ,2018).
- Dahlan Thaib. 2002. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty.
- Erliana Hasan. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Fence M. Wantu. 2011. *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H.A. Muin Fahmal. 2006. *Peran Asas-asas Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pmerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press.

- Idup Suhady. 2009. *Kepemerintahan yang Baik, Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia.
- J. Salusu. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Jazim Hamidi. 1999. *Penerapan AAUPPL Di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Janedjri M. Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Johan Jasin. 2014. *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish, 2014
- Kaelan dan Ahmad Zubaidi. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma Akhyar.
- L.Ansori. 2018. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Cetakan Pertama, Setara Press.
- Megawati dan Ali Murtopo. 2006. *Parlemen Bikameral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Universitas Michigan, UAD Press, 2006
- Moh. Mahfud MD. 1988. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Tahir Azhary. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Moh. Koesnardi dan Bintang Saragih. 1986. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia, cetakan Kelima.
- Mukthie Fajar. 2004. *Tipe Negara Hukum*. Intrans, Malang, 2004
- Nainggolan. 1997. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT. Pertja.
- Patuan Sinaga. 2001. *Hubungan Antara Kekuasaan Dengan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Philipus M Hadjon dkk. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Gajahmada University Press, Cet. Ke-11.
- . 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Surabaya: UNAIR.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD. 2002. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Salim HS. 2013. Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soegito, H.A.T. 2005. *Rule of Law*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi.
- Soehino. 1981. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudono Syueb. 2008. *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Laksbang Mediatama.
- Supami Pamudji. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Titik Triwulan Tutik. 2005 *Pemilihan Kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*. Surabaya: Prestasi Pustaka.
- Winarno, “*Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/ 2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*”, PT. Bina Aksara, Jakarta, cetakan Kedua, 2008.

B. Jurnal/Tesis/Disertasi

- Akhmad Marwi, “Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram)”, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2018.

- Akadun, “*Good Governance*”, STIA Sebelas April Sumedang *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 9, No. 1, Maret 2007: 37 – 47.
- Andika Tresno dkk, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado”, *Jurnal Eksekutif Vol 1, No 1 (2017)*, Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol – Unsrat.
- Brian Tamanaha (Cambridge University Press, 2004), lihat Marjanne Termoshuizen-Artz, “*The Concept of Rule of Law*”, *Jurnal Hukum Jentera*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun II, November 2004
- Catur Wido Haruni, *Naskah Publikasi Hasil Penelitian P2I: Kajian Kritis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO.5/PUU-V/2007 Tentang Calon Independen Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. FH UMM, 2008.
- H. Ismail MZ, “Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Sebagai Momentum Strategis Dalam Pengembangan Otonomi Daerah Dan Demokrasi Lokal”, *Jurnal Valid Vol. 11 No. 2, April 2014: 57 – 72*.
- Mardiasmo, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Cet. 1, (Yogyakarta : Andi Offset..
- Melissa walukouw, Julia, *Perwujudan prinsip Equality before the law bagi narapidana di dalam lembaga permasyarakatan di Indonesia*, *Lex et Societass* 1, No.1, tahun 2013.
- Muhammad Amin Nasution, “Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan

Good Governance”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2021.

Lukman Hakim, “Implikasi Pilkada Langsung Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Penyusunan Program Pembangunan Daerah”, *Jurnal Konstitusi* Puskasi FH Universitas Widyagama Malang, Volume III No 1 Juni Tahun 2010.

Phillipus M Hadjon. *Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Meritokrasi. Vol 1 No 1, 2002.

Qamar, Nurul, Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 13, Nomor 2, Mei-Agustus 2011;

Setiyono, Budi, 2014, *Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik*, Cet. 1, (Yogyakarta : Caps.

Suhardjo, “Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan)”, *Jurnal Anterior Jurnal*, Volume 19 Issue 1, Desember 2019, Page 7 – 31 Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Supriadi, “Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”, *Jurnal Yuridis* Vol. 1 No. 1, Juni 2014: 57 – 72 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Sugiono, Bambang dan Husni M.D, Ahmad Supremasi Hukum dan Demokrasi. *Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 14, Agustus 2000.

Wicipto Setiadi. Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1, Nomor 1, Januari-April 2012.

Zaid Afif, Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol.2 No.5, Juli-Desember 2018.

C. Kamus

Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tim Penyusun Kamus. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

WJS.Poerwadarminta. 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. UU Nomor 8 Tahun 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678.

Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. UU nomor 30 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN. UU Nomor 28 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

E. Internet

Ananda Koesoema, *Administrasi Kepegawaian di Pemerintah Daerah* diakses melalui www.reformasibirokrasi.com., diakses tanggal 10 September 2022.

Anonim, *Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, <http://pemerintah.net>, tanggal akses 25 September 2022.

Ananda Koesoema, *Administrasi Kepegawaian di Pemerintah Daerah*, diakses melalui www.reformasibirokrasi.com., diakses tanggal 10 Oktober 2022.

Bur Rasuanto, *Reformasi Administrasi Kepegawaian dari Kepegawaian Konvensional Ke Arah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Yang Berbasis Teknologi Informasi*, www.reformasibirokrasi.com, diakses tanggal 23 September 2022.

Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, diakses melalui <http://www.docudesk.com>, tanggal akses 20 September 2022.

Satjipto Rahardjo, “*Suatu versi Indonesia tentang Rule of Law*”, Kompas, 19 November 1993.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/supremasi-hukum-lt62b18957b41e1>
diakses pada 8 November 2023.

<https://www.kajianpustaka.com/2022/06/responsivitas.html> diakses pada 8 November 2023.

<https://www.daftarinformasi.com/prinsip-good-governance/> diakses pada 8 November 2023.